KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : BKSAP usul bentuk Parlemen ASEAN
Tanggal : Sabtu, 05 Agustus 2023
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

Sidang Umum Ke-44 AIPA

BKSAP Usul Bentuk Parlemen ASEAN

Putu Supadma Rudana

SIDANG Umum ke-44 atau The-44th ASEAN Inter-Parliamentary (AIPA) Assembly dibuka hari ini di Jakarta. Sidang akan berlangsung enam hari, sampai Kamis (10/8). Tema yang diusung adalah *"Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN"* yang menekankan pada konsep *green economy* atau ekonomi hijau.

Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Putu Supadma Rudana mengatakan, tema ini sangat relevan untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Sebab, saat ini dunia cenderung melihat sisi pertumbuhan ekonomi tinggi saja, yang dianggap sebagai satu-satunya tolok ukur positif dengan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebagai acuan tunggalnya.

"AIPA justru menjadi satu penarik dari berbagai kekuatan global (untuk mendorong ekonomi hijau)," ucapnya, kemarin.

Untuk itu, Putu mendorong pembentukan ASEAN Parliament demi memperkuat kepentingan ASEAN secara parlementer atau secara DPR.

Dengan adanya ASEAN Parliament, negara-negara Asia Tenggara akan menjadi satu kekuatan besar dan menjadi satu keluarga atau *ASEAN family*.

"Dengan adanya ASEAN Parliament, segala pengawalan kepentingan dan potensinya dapat dilakukan bersama-sama," terang Putu.

AIPA saat ini beranggota 10 negara ASEAN. Sembilan negara hadir di Sidang Umum ke-44 AIPA dan satu negara, yaitu Myanmar, tidak diundang. Alasannya, saat ini; demokratisasi di Myanmar belum terimplementasi.

"AIPA dan ASEAN terus mengawal proses demokratisasi Myanmar," jelas legislator asal Bali ini.

Putu mengatakan, Indonesia sebagai Ketua AIPA mendorong *five point consensus* agar diterapkan dan diimplementasikan Myanmar. Negara itu saat ini dipimpin Junta Militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis atau kudeta.

Putu lalu menerangkan five point consensus yang dimaksud. Pertama, tidak adanya kekerasan, stop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari utusan khusus PBB untuk Myanmar.

Keempat, isu-isu yang berhubungan dengan hak asasi manusia (HAM) harus dijaga, karena banyak pengungsi. Jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa.

Kelima, ASEAN mengirim utusan untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar.

Putu melanjutkan, Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta juga akan membahas berbagai isu seperti isu kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politik, ekonomi, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA.

Tak ketinggalan juga akan dibahas isu sawit, nikel, isu konflik Rusia-Ukraina, Myanmar, tujuan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau. ■ USU